

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan lingkungan permukiman kumuh merupakan fenomena yang banyak muncul di perkotaan. Permasalahan ini menjadi krusial disaat semakin banyaknya permukiman kumuh dengan minimnya solusi yang implementatif. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan permukimannya secara mandiri. Salah satu lembaga yang berpotensi dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal itu sendiri dengan adanya aturan-aturan (*rules*) dan peran-peran (*roles*) yang melaksanakan tindakan kolektif untuk pencapaian tujuan dan penyelesaian permasalahan. Karakteristik pada kelembagaan lokal tersebut, seperti berada pada wilayah tertentu, dorongan sukarela, beranggotakan anggota masyarakat, berdasarkan kemampuan masyarakat, dan bertujuan untuk pemenuhan penyelesaian permasalahan (Florin dan Wandersman, 1990). Peran kelembagaan lokal dalam hal ini cukup besar sebab merupakan salah satu aktor penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan kumuh dan penataan kawasan permukiman disaat pemerintah memiliki keterbatasan.

Dalam konteks perencanaan, kawasan permukiman pada suatu lingkungan merupakan level yang paling kecil dalam skala kota. Didalamnya terdapat unsur fisik, lingkungan, dan interaksi antar masyarakatnya. Pada kawasan permukiman kumuh, unsur ketiganya menjadi terganggu. Perlu adanya penataan dan pengendalian kawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga dibutuhkan kapasitas kelembagaan lokal dalam penataan lingkungan permukimannya.

Hal ini juga terjadi pada salah satu program pemerintah penataan lingkungan permukiman di perkotaan yang berbasis kesejahteraan masyarakat, yakni program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Program PLPBK telah berjalan sejak tahun 2008 di Indonesia dan salah satu wilayah sasarnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Melalui program ini dengan

menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Harapannya, masyarakat memiliki kapasitas dalam memetakan potensi yang ada, merencanakan, dan menata lingkungannya secara mandiri.

Konsep dasar dari PLPBK yang telah berjalan sejak tahun 2008 di Indonesia adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2008 hingga 2013, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 185 BKM yang mewakili desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan program PLPBK. Manfaat yang dapat dirasakan langsung adalah dengan adanya dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar 1 Milyar yang diberikan melalui BKM setempat sebagai modal dalam penataan kawasan lingkungan permukiman di kelurahannya.

Terkait dengan kapasitas kelembagaan lokal yang dimana pada penelitian ini adalah BKM, perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat sangat sulit (Hasil FGD Kabupaten Kendal, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya suatu pengembangan kapasitas kelembagaan lokal agar dalam menjalankan program penataan lingkungan permukiman di perkotaan dapat berjalan efektif. Selain itu, permasalahan yang muncul di masyarakat adalah kapasitas dari BKM yang masih minim, dari pengurusan administrasi, pembuatan proposal, SPJ, hingga pengelolaan hasil pembangunan (Hasil FGD Kota Pekalongan, 2014).

BKM tersebut merupakan lembaga nirlaba yang dengan kerelawanan, komitmen, kepercayaan, serta rasa komunitas yang tinggi secara bersama-sama menata dan mengelola kawasan lingkungannya. Akan tetapi, fenomena yang terjadi adalah sebaliknya. Masih terdapat BKM yang dalam pemanfaatan dana BLM dan menjalankan kegiatan PLPBK yang bervariasi (Fultanegara, 2013). Selain itu, minimnya kemampuan serta menurunnya jiwa kerelawanan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan PLPBK secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan (TNP2K dalam Depkominfo, 2011). Modal sosial itu sendiri diartikan sebagai pengetahuan bersama, pemahaman bersama, pranata bersama dan pola interaksi antar individu di dalam aktivitasnya. Menurut North (1997) dalam Rais (2003:6) lembaga informal memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan individu dan sosial sebagai *social capital* (modal sosial).

Kelembagaan dalam program ini cukup bervariasi. Kinerja BKM yang ada di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang bervariasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemanfaatan dana BLM yang masing-masing BKM memiliki kapasitas dalam penyerapan dana yang berbeda-beda, kinerja dalam implementasi terhadap permasalahan penataan lingkungan, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal (Satker PBL Provinsi Jawa Tengah).

Isu yang muncul pada aspek kelembagaan ini yakni tidak semua BKM telah siap, memiliki kemampuan, serta jiwa kerelawanan dalam perwujudan program PLPBK secara efektif (TNP2K dalam Depkominfo, 2011). Masih terdapat BKM yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana, masih minimnya kemampuan dalam mengidentifikasi potensi masalah wilayahnya, merencanakan dan mengimplementasikan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Selain itu, kapasitas juga terkait dengan kepercayaan satu sama lain (*trust*) dimana ketika suatu masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi pada masyarakat lainnya, maka kontribusi untuk pengembangannya akan tinggi. Hal ini tentunya memiliki hubungan antara kepercayaan dengan kontribusi yang akan diberikan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal ini juga terkait dengan efektivitas lembaganya dalam menjalankan program, seperti yang diungkapkan Linneall dalam Kapucu (2011). Menurut Lineall, dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat dari kapasitas lembaga dalam pencapaian tujuan. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Eisegner dalam Kapucu (2011) bahwa efektivitas dari suatu lembaga diukur dari pemenuhan tujuan dan peningkatan kinerja lembaga. Efektivitas program PLPBK yang dijalankan di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diukur dari kesesuaian implementasi hasil kegiatan, realisasi hasil pemanfaatan dana BLM, dan kemampuan hasil kemitraan menunjukkan hasil yang baik (Fultanegara, 2013). Akan tetapi, dari sisi pengelolaan hasil pembangunan dari masyarakat masih minim. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih minimnya perubahan pola pikir masyarakat di daerah tersebut dalam mengelola lingkungannya.

Selain itu, identifikasi kegagalan dan munculnya keterbelakangan wilayah yang selama ini terjadi dinilai hanya dari minimnya potensi sumberdaya. Padahal ketidakmampuan suatu lembaga yang secara swadaya dalam mengidentifikasi potensi masalah wilayahnya, merencanakan, mengimplementasikan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan menjadi salah satu hal yang mendasar dalam kesuksesan suatu program atau kegiatan. Adanya perubahan modal sosial di masyarakat yang murni, bekerja apa adanya, dengan tingkat kerelawanan yang tinggi. Selain itu, keefektifan program dalam menjalankannya juga menjadi hal yang penting demi keberlanjutan program penataan lingkungan kawasan permukiman ini.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu adanya kajian mengenai kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Pada akhirnya nanti akan ada pengembangan kapasitas kelembagaan lokal (BKM) sebagai upaya dalam perwujudan program PLPBK secara efektif yang dimana masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan. Kajian tersebut dapat dilihat dari analisis efektivitas pelaksanaan program PLPBK, analisis kapasitas kelembagaan lokal pada tiga level, yakni level individu, kelompok, dan organisasi, serta analisis keberlanjutan program PLPBK. Hal ini dikaji dengan mengkomparasikan tujuh BKM yang menjalankan program tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Peningkatan kinerja program PLPBK dalam upaya dan penataan lingkungan permukiman kumuh salah satunya dilakukan dengan pengembangan kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal pada penelitian ini berupa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga nirlaba yang bersifat nonstruktural pada wilayah/ daerah tertentu yang melakukan kegiatan secara kolektif melalui penetapan tujuan dan pelaksanaan kegiatan bersama (Mehring et al, 2011). BKM bagian dari organisasi keanggotaan/ asosiasi swadaya dengan tugas-tugas khusus yang berasaskan kepercayaan antara satu dengan yang lain. Kelembagaan lokal dengan adanya peranan masyarakat dalam program Kesejahteraan Sosial telah diatur dalam UU Kesejahteraan Sosial No. 11 Tahun

2009 pasal 38 ayat 1 “masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”. Masyarakat disini ditekankan pada pasal 38 ayat 2 yang salah satunya adalah badan keswadayaan masyarakat.

Kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa kajian mengenai kapasitas kelembagaan lokal yakni BKM di Kabupaten Kendal dan BKM di Kota Pekalongan serta mengkaji efektivitas program PLPBK. Aspek yang dikaji berupa efektivitas program PLPBK, analisis pengembangan kapasitas kelembagaan lokal pada level individu, organisasi, sistem kelembagaan, serta keterkaitan antar keduanya yang dilihat dengan mengkomparasikan beberapa BKM.

Pada tahap pelaksanaan program PLPBK, pengembangan kelembagaan lokal berada pada tahapan pertama yakni pendampingan masyarakat. Pada tahap ini dilakukan melalui intervensi perubahan sikap/perilaku/cara pandang serta pola pikir masyarakat agar mampu menjadi lembaga swadaya dengan kerelawanan, komitmen, kepercayaan, serta rasa komunitas yang tinggi secara bersama-sama menata dan mengelola kawasan lingkungannya. Akan tetapi, masih terdapat BKM yang dalam pemanfaatan dana BLM dan menjalankan kegiatan PLPBK yang bervariasi (Fultanegara, 2013).

Data hasil monitoring dan evaluasi Satker PBL Provinsi Jawa Tengah (2012) menggambarkan bahwa dari 185 kelurahan yang melaksanakan PLPBK, hanya sebagian kecil saja yang dikatakan berhasil pada pemanfaatan program (*outcomes*), sebagian besar hanya pada tahap implementasi program (*output*) dan bahkan ada yang gagal atau tidak mampu menjalankan kegiatan sampai selesai. Hal ini menandakan tidak semua BKM telah siap dan memiliki kapasitas dalam perwujudan program PLPBK secara efektif. Selain itu, minimnya kemampuan serta menurunnya jiwa kerelawanan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan PLPBK secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan (TNP2K dalam Depkominfo, 2011). Kemudian, jika dilihat dari sisi pengelolaan hasil pembangunan dari masyarakat masih minim. Hal ini juga dipengaruhi oleh masih minimnya perubahan pola pikir masyarakat di daerah tersebut dalam mengelola lingkungannya.

Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program PLPBK, dengan pertanyaan penelitian “Sejauh mana tingkat kapasitas kelembagaan lokal (BKM) dan efektivitas pelaksanaan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan?”

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran dari penelitian yang dilakukan.

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengkaji kapasitas kelembagaan lokal dan tingkat realisasi program PLPBK. Pada penelitian ini, kajian tersebut dilakukan dengan komparasi beberapa BKM, yakni empat BKM di Kabupaten Kendal dan tiga BKM di Kota Pekalongan

#### **1.3.2 Sasaran**

Sasaran penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan, antara lain:

1. Analisis tingkat realisasi program PLPBK yang dilihat dari realisasi pemanfaatan BLM, program pemanfaatan dana BLM, dan besaran kemitraan program
2. Analisis kapasitas kelembagaan lokal yang dilihat dari level individu, kelompok, dan organisasi
3. Analisis keberlanjutan program PLPBK dilihat dari prinsip keberlanjutan (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dilihat dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pembelajaran dalam upaya peningkatan efektivitas program PLPBK selanjutnya. Hal ini bertujuan program yang telah

dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat seutuhnya. Kemudian, dapat dijadikan pembelajaran untuk pengembangan kapasitas kelembagaan lokal agar mampu menjalankan program secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

2. Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat dan masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat:
  - Meningkatkan kesadaran perubahan pola fikir masyarakat untuk bersama-sama menata dan menjaga lingkungan
  - meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal (BKM) dan masyarakat untuk memiliki kerelawanan tinggi, rasa memiliki, komitmen, kepercayaan, dan kepedulian untuk menjalankan program dan mengelola hasil pembangunan di kawasannya sendiri
  - meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program-program pembangunan yang ada disekitarnya
3. Bagi ilmu pembangunan wilayah dan kota, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya penataan ruang dimana pada kajian ini adalah penataan kawasan. Tata ruang dalam program PLPBK menjadi aspek penting yang perlu dimiliki untuk menjadikan kawasan lebih tertata, layak untuk dihuni, serta bernilai estetika. Untuk pencapaian penataan ruang yang baik, perlu dimiliki suatu kelembagaan lokal untuk bekerjasama dalam upaya pengembangan kapasitasnya serta meningkatkan efektivitas program sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah batasan secara substansial maupun administratif dalam penelitian yang dilakukan. Batasan ini bertujuan sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

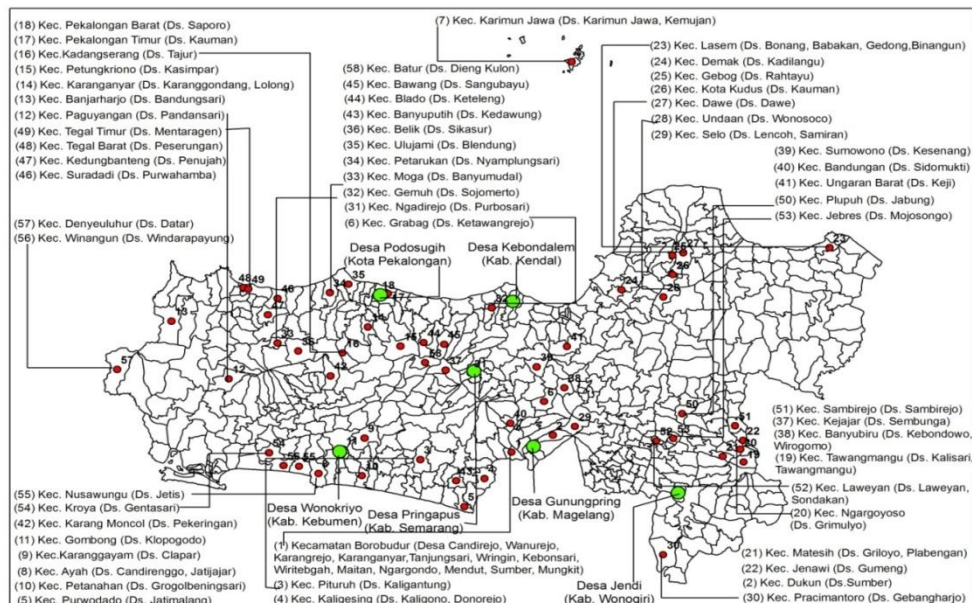
### **1.5.1 Ruang Lingkup Spasial**

Penelitian ini mengambil tujuh lokasi program PLPBK yaitu empat lokasi di Kabupaten Kendal dan tiga lokasi di Kota Pekalongan. Ketujuh lokasi tersebut dinilai baik dalam menjalankan program serta dua diantaranya merupakan

lokasi *pilot project* dari program PLPBK sejak tahun 2008 yang telah dilaksanakan di 185 desa/kelurahan di Jawa Tengah. Ketujuh lokasi tersebut diambil sebagai lokasi studi dengan berdasarkan penelitian terdahulu (Aprinasari, 2013), antara lain:

- a. Hasil wawancara terstruktur Satker PBL Provinsi Jawa Tengah bahwa Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan menjadi duta PLPBK yang dinilai baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK
- b. Dari 185 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Kebondalem, desa Plantaran, Kutoharjo, dan Sidorejo di Kabupaten Kendal serta Kelurahan Podosugih, Kramatsari, dan Kraton Kidul di Kota Pekalongan telah mampu menyerap dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) hampir 100%
- c. Tujuh BKM yang ada di kelurahan/desa tersebut dinilai baik dalam menjalankan program PLPBK

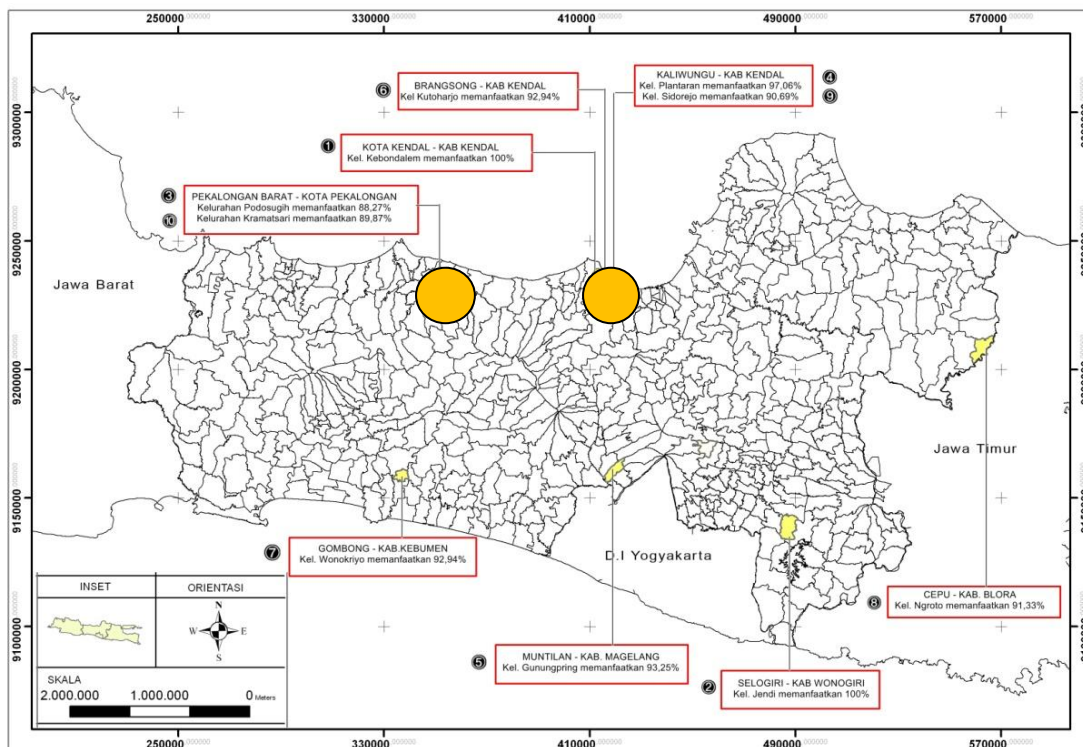
Pertimbangan tersebut juga didukung dengan keterbatasan waktu, sumberdaya, dana, serta kedekatan dengan Kota Semarang. Oleh karena itu, ruang lingkup spasial pada penelitian ini adalah Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan.



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.1**  
**PROGRAM PLPBK DI JAWA TENGAH**





Sumber: Satker PBL Provinsi Jawa Tengah, 2012

**GAMBAR 1.2**  
**LOKASI PENELITIAN DI KABUPATEN KENDAL**  
**DAN KOTA PEKALONGAN**

### 1.5.2 Ruang Lingkup Substansial

Batasan materi yang digunakan pada penelitian ini terkait pada aspek-aspek sebagai berikut:

#### 1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal

Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal merupakan salah satu aspek kajian dalam penelitian ini. Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal itu sendiri merupakan kerjasama sukarela dalam upaya membantu masyarakat pada daerah tertentu untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial, ekonomi masyarakat (Christenson dalam Florin dan Wandersman, 1990). Kemudian hal ini juga ditambahkan oleh Linneall dalam Kapucu (2011) bahwa dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilakukannya suatu penambahan hal-hal baru yang bernilai baik sehingga adanya peningkatan kemampuan suatu lembaga dalam pencapaian misi. Pada penelitian ini, kajian mengenai

pengembangan kapasitas kelembagaan lokal mencakup variabel level individu, organisasi, dan lembaga.

## 2. Realisasi Program

Efektivitas mempunyai tujuan utama untuk mengetahui perubahan yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya program atau kegiatan, serta kinerja program mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai Dunn (1998). Menurut Lineall, dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat dari kapasitas lembaga dalam pencapaian tujuan. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Eisegner dalam Kapucu (2011) bahwa efektivitas dari suatu lembaga diukur dari pemenuhan tujuan dan peningkatan kinerja lembaga. Ruang lingkup efektivitas yang dikaji pada program PLPBK pada penelitian ini berada pada tahap proses perencanaan, pemasaran, dan pelaksanaan pembangunan.

## 3. PLPBK sebagai program penataan lingkungan permukiman di perkotaan

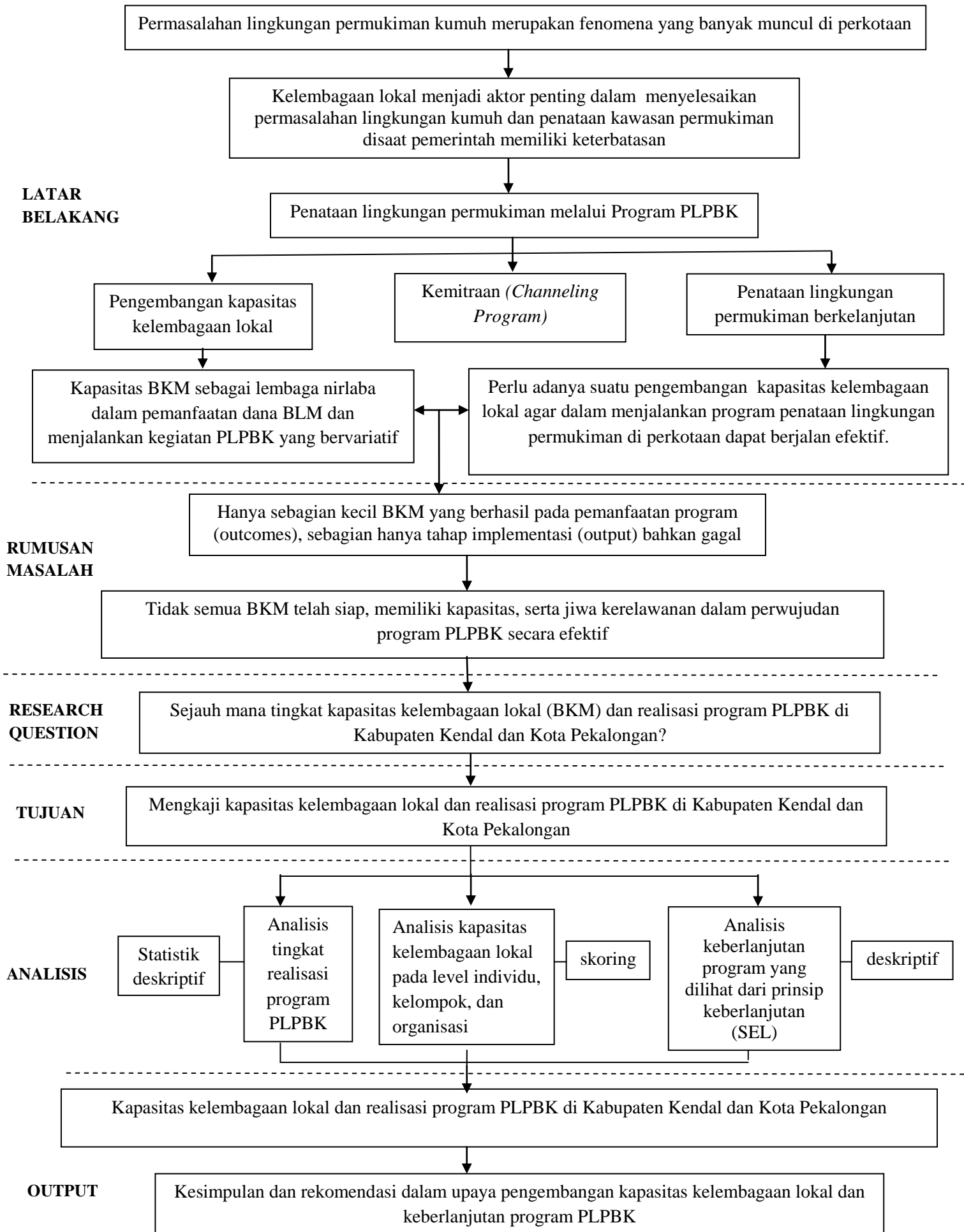
Program PLPBK merupakan salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan pada penataan kawasan lingkungan dengan menjadikan masyarakat agar mampu melihat permasalahan di lingkungannya sendiri, merencanakan, serta menata secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal yang secara bersama-sama memiliki kerelawanan untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Materi dalam penelitian ini berupa PLPBK sebagai salah satu program penataan kawasan lingkungan di perkotaan dengan mengambil wilayah studi Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) ini merupakan program lanjutan dari PNPM (Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan) Mandiri Perkotaan di bawah naungan DPU Cipta Karya. Sejak tahun 2008 hingga 2013, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 185 BKM yang mewakili desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan

program PLPBK. Manfaat yang dapat dirasakan langsung adalah dengan adanya dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar 1 Milyar yang diberikan melalui BKM setempat sebagai modal dalam penataan kawasan lingkungan permukiman di kelurahannya. BKM tersebut merupakan lembaga nirlaba yang dengan kerelawanan, komitmen, kepercayaan, serta rasa komunitas yang tinggi secara bersama-sama menata dan mengelola kawasan lingkungannya. Akan tetapi, fenomena yang terjadi adalah sebaliknya. Masih terdapat BKM yang dalam pemanfaatan dana BLM dan menjalankan kegiatan PLPBK yang bervariasi. Selain itu, minimnya kemampuan serta menurunnya jiwa kerelawanan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan PLPBK secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan (TNP2K dalam Depkominfo, 2011).

Perubahan yang terjadi berupa perubahan modal sosial dimana BKM itu sendiri saat ini berubah mencari keuntungan. Tidak semua BKM telah siap, memiliki kemampuan, serta jiwa kerelawanan dalam perwujudan program PLPBK secara efektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu adanya kajian mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan kaitannya terhadap efektivitas program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Kajian tersebut dapat dilihat dari analisis efektivitas program PLPBK, analisis kapasitas kelembagaan lokal pada aspek individu, kelompok, lembaga, serta keberlanjutan program. Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada kerangka pemikiran di bawah ini:

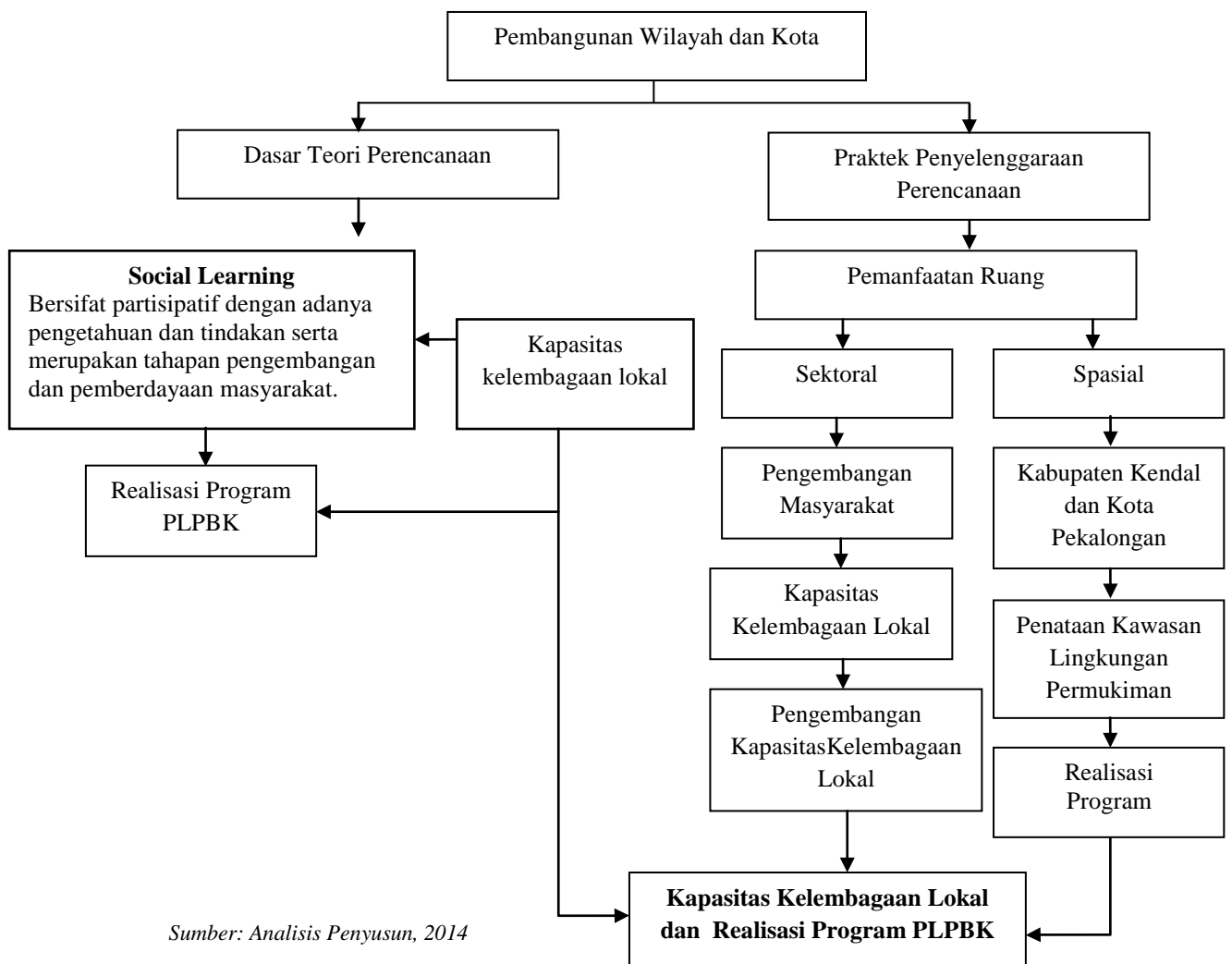


Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.3**  
**KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN**

### 1.7 Posisi Penelitian dalam Lingkup Pembangunan Wilayah dan Kota

Posisi penelitian ini pada lingkup pembangunan wilayah dan kota dengan dasar teori pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program PLPBK berada pada posisi *sosial learning*. Pembelajaran sosial disini bersifat partisipatif dengan adanya pengetahuan dan tindakan serta merupakan tahapan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program PLPBK sebagai upaya penataan kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat untuk mampu merencanakan dan mengimplementasikan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan program dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan yang *bersifat bottom-up planning* dimana masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan. Posisi penelitian ini berada pada bidang ilmu pembangunan wilayah dan kota yang berupa:



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

**GAMBAR 1.4**  
**POSISI PENELITIAN**

### 1.8 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian ini mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan kaitannya terhadap efektivitas program PLPBK. Berikut ini adalah keaslian penelitian yang dilakukan dengan perbedaannya dengan penelitian terdahulu:

**TABEL I.1**  
**KEASLIAN PENELITIAN**

No	Nama	Judul Penelitian	Lokasi dan Tahun Penelitian	Fokus Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Andre Cahya Hidayat	Peran Lembaga Lokal Dalam Penataan Ruang di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora	Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis stakeholder pelaksana penataan ruang</li> <li>Analisis karakteristik lembaga lokal pada program PLPBK</li> <li>Analisis peran lembaga lokal</li> <li>Analisis keberlanjutan peran lembaga lokal</li> </ul>	Kualitatif Deskriptif	Adanya peran lembaga lokal dalam penataan ruang di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
2	Imanda Junifar	Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Tata Ruang di Kota Ambarawa	Kota Ambarawa, 2009	Analisis kapasitas kelembagaan perencanaan tata ruang di Kota Ambarawa	Kualitatif Deskriptif	Kapasitas kelembagaan perencanaan tata ruang yang dilihat dari aspek sistem kelembagaan, organisasi, dan individu
3	Anggun Aprinasari F	Kapasitas Kelembagaan Lokal dan Efektivitas Program Penataan Lingkungan Permukiman di Perkotaan	Kota Pekalongan dan Kabupaten Kendal, 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis efektivitas pelaksanaan program PLPBK</li> <li>Analisis kapasitas kelembagaan lokal</li> <li>Analisis keberlanjutan program dilihat dari prinsip keberlanjutan (SEL)</li> </ul>	Kuantitatif Deskriptif	Efektivitas pelaksanaan program PLPBK dan kapasitas kelembagaan lokal

*Sumber: Analisis Penyusun, 2014*

### 1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai dasar dari sebuah penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan peneliti mempunyai dasar yang kuat pada penelitian yang akan dilakukan serta memudahkan pembaca dalam memahami

penelitian tersebut. Metode penelitian yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian dari data yang berupa angka-angka. Dari angka-angka tersebut kemudian dilakukan analisis berdasarkan prosedur statistik. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif umumnya memiliki struktur yang ketat dan konsisten yang dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan (Creswell, 2008).

Pendapat dari Creswell tersebut didukung oleh Sugiyono (2012) yang menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan jawaban responden atau pertanyaan yang merupakan pengukuran dari variabel yang diteliti, serta menguji hipotesis. Pemahaman ini didukung juga oleh Masri Singarimbun dan Sifian Effendi (1989) dalam Nazir (2005) yang menyatakan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Metode penelitian kuantitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik. Pendekatan positivistik ini berlandaskan filsafat positivisme dimana telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang objektif, terukur, kongkret, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program penataan lingkungan permukiman di perkotaan. Fokus penelitian ini adalah variabel kapasitas kelembagaan lokal yang pada penelitian ini kelembagaan lokal yang difokuskan berupa BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang terdiri dari level individu, level kelompok, dan level organisasi.

Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa data kuantitatif dengan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan cara kajian dokumen realisasi pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), observasi lapangan, dan kuisisioner. Data dari kajian dokumen menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan penjabaran narasi deskriptif. Kemudian, pada analisis kuantitatif adanya pengolahan kuisisioner dengan penggunaan teknik analisis

skoring dengan menggunakan skala *Likert*. Teknik ini digunakan untuk menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman di perkotaan. Hasil dari pengolahan data-data dari variabel kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan, hasilnya akan berupa angka-angka yang kemudian dijabarkan dengan narasi deskripsi.

### **1.10 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman di perkotaan ini terdiri dari lokasi penelitian, materi penelitian, dan pelaku penelitian. Berikut ini adalah penjelasannya:

- Fokus lokasi penelitian adalah Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Kedua wilayah tersebut menjadi lokasi pilot project pelaksanaan program PLPBK serta program lanjutannya. Lokasi penelitian yakni di tujuh BKM pada kedua kabupaten/kota tersebut.
- Materi yang dibahas pada penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan lokal yang dimana pada penelitian ini difokuskan pada BKM dan efektivitas pelaksanaan program PLPBK. Setelah itu, dikaji keterkaitan antar keduanya. Tingkat kapasitas kelembagaan lokal dilihat dari level individu, level organisasi, dan sistem kelembagaan, sedangkan efektivitas program dilihat dari kinerja proyek, kinerja program, dan keberlanjutan program.
- Pelaku penelitian terdiri dari pihak-pihak yang terkait dalam proses penelitian, diantaranya:
  - Peneliti yang memiliki peran sebagai instrumen utama dalam penelitian
  - Responden yang menjadi pihak pemberi informasi (narasumber kuesioner), yakni anggota BKM sebagai responden kuesioner

### **1.11 Operasionalisasi Penelitian**



### 1.11.1 Definisi

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Definisi operasional juga digunakan untuk membuat pikiran utama penelitian agar sesuai dengan ruang lingkup substansial yang terkait dengan tema. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah dasar terkait dengan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program penataan lingkungan perumahan di perkotaan, yaitu:

a. Pengembangan kapasitas kelembagaan

Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal merupakan salah satu aspek kajian dalam penelitian ini. Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal itu sendiri merupakan kerjasama sukarela dalam upaya membantu masyarakat pada daerah tertentu untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial, ekonomi masyarakat (Christenson dalam Florin dan Wandersman, 1990). Kemudian hal ini juga ditambahkan oleh Linneall dalam Kapucu (2011) bahwa dalam pengembangan kapasitas kelembagaan dilakukannya suatu penambahan hal-hal baru yang bernilai baik sehingga adanya peningkatan kemampuan suatu lembaga dalam pencapaian misi. Pada penelitian ini, kajian mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan lokal mencakup variabel level individu dan lembaga.

b. Realisasi program

Efektivitas mempunyai tujuan utama untuk mengetahui perubahan yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya program atau kegiatan, serta kinerja program mengenai seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai Dunn (1998). Menurut Lineall, dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilihat dari kapasitas lembaga dalam pencapaian tujuan. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Eisegner dalam Kapucu (2011) bahwa efektivitas dari suatu lembaga diukur dari pemenuhan tujuan dan peningkatan kinerja lembaga. Ruang lingkup efektivitas yang dikaji pada program PLPBK pada penelitian ini berada pada tahap proses perencanaan, pemasaran, dan pelaksanaan pembangunan.

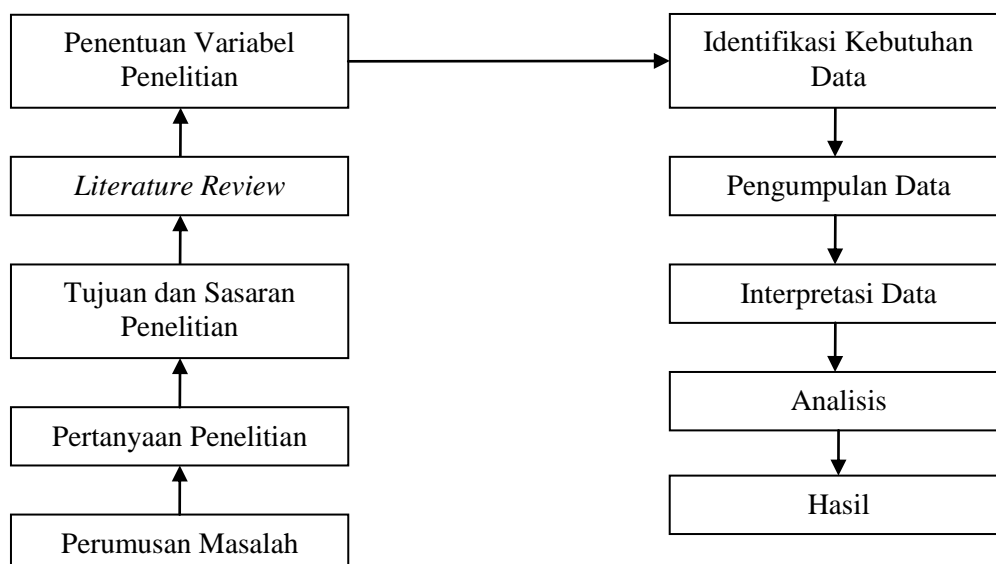
c. Program PLPBK

Program PLPBK merupakan salah satu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan pada penataan kawasan lingkungan dengan menjadikan masyarakat agar mampu melihat permasalahan di lingkungannya sendiri, merencanakan, serta menata secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan pengembangan kapasitas kelembagaan lokal yang secara bersama-sama memiliki kerelawanan untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Materi dalam penelitian ini berupa PLPBK sebagai salah satu program penataan kawasan lingkungan di perkotaan dengan mengambil wilayah studi Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan.

Berdasarkan definisi operasional di atas, penelitian ini merupakan studi yang mengkaji kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman di perkotaan. Kapasitas kelembagaan lokal dilihat dari level individu, level organisasi, dan sistem kelembagaan, sedangkan efektivitas program dilihat dari kinerja proyek pembangunan, kinerja program, dan keberlanjutan program.

### 1.11.2 Kerangka Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:



*Sumber: Analisis Pribadi, 2014*

**GAMBAR 1.5**  
**TAHAPAN PENELITIAN**

### 1.12 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berfungsi untuk memperoleh input data yang akan digunakan dalam proses analisis. Menurut Sugiyono (2012) pengumpulan data adalah langkah awal dan utama dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari pengamatan secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder didapat dari instansi terkait. Proses pengumpulan data dilakukan dua tahap, yaitu:

1) Tahap Survey Awal (*Preliminary Survey*)

Tahap survey awal dilakukan untuk mengenali hal-hal apa saja yang terkait dengan fenomena yang ada di lapangan. Survey awal memudahkan dalam pelaksanaan survey utama selanjutnya. Langkah-langkah yang dilakukan pada survey awal, yakni mempersiapkan rancangan pelaksanaan survey untuk mendapatkan informasi awal mengenai beberapa BKM yang menjalankan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan, karakteristik wilayah dan masyarakat, penyusunan surat survey serta perizinan instansi dalam proses pengumpulan data.

2) Tahap Survey Utama

Tahap survey utama dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian. Data-data tersebut didapat dengan beberapa cara, yakni:

### **1.12.1 Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan data primer adalah salah satu cara untuk mendapatkan data secara langsung. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi langsung, dan kuisioner. Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah:

1) Observasi Langsung (*Direct Observation*)

Observasi langsung merupakan kegiatan observasi pada objek-objek tertentu, proses, hubungan masyarakat yang selanjutnya dicatat hasilnya (Sugiyono, 2012). Observasi ini dilakukan secara langsung ke masyarakat ataupun pengamatan langsung mengenai kondisi di lapangan. Teknik observasi langsung bertujuan untuk cek ulang (*cross-check*) terhadap jawaban dari hasil kuesioner. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan pengamatan wilayah studi untuk mengidentifikasi potensi wilayah yang

ada, pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan di BKM setiap harinya, antusias masyarakat dalam menjalankan program PLPBK, kapasitas kelembagaan lokal, serta efektivitas program PLPBK itu sendiri.

## 2) Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal apa saja yang ingin diketahui (Sugiyono, 2012). Kuisisioner pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program penataan lingkungan perumahan di perkotaan. Kuisisioner yang disebarkan merupakan kuisisioner dengan tipe pertanyaan tertutup. Sugiyono (2012) mengungkapkan kuisisioner dengan pertanyaan tertutup membantu responden dalam menjawab pertanyaan serta memudahkan analisis data. Selain itu, pertanyaan di kuisisioner pada penelitian ini mengharapkan jawaban dengan bentuk data nominal dan ordinal. Pertanyaan tertutup pada kuisisioner ini digunakan untuk menanyakan hal-hal atau variabel yang telah diklasifikasikan sebelumnya.

### **1.12.2 Pengumpulan Data Sekunder**

Perolehan data yang didapat secara tidak langsung dilakukan melalui pengumpulan data sekunder. Pada teknik ini dilakukan melalui studi literatur dan survey instansi. Teknik-teknik yang digunakan pada pengumpulan data primer adalah:

#### 1) Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi secara teoritis berupa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini didapatkan melalui buku-buku relevan, artikel terkait, dan dokumen perencanaan. Manfaat yang didapat dari studi literatur ini adalah peneliti memiliki dasar pengetahuan dan informasi dalam mengkaji permasalahan secara teoritis. Dari studi literatur yang telah dilakukan peneliti, didapatkan variabel penelitian berupa kapasitas kelembagaan lokal dilihat dari level individu, level organisasi, dan sistem kelembagaan, sedangkan

efektivitas program dilihat dari kinerja proyek pembangunan, kinerja program, dan keberlanjutan program.

## 2) Survey Instansi

Survey instansi bertujuan untuk mendapatkan data-data dari instansi terkait, seperti realisasi pemanfaatan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM), produk perencanaan yang didapatkan dari BKM terkait (RPP dan RTPLP). Selain itu, survey instansi juga dilakukan ke kelurahan untuk perolehan data monografi. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung dalam melakukan penelitian. Melalui teknik ini, seorang peneliti juga dapat memahami mengenai wilayah studi dan fokus penelitian yang akan diambil.

### 1.13 Teknik Sampling

Sejak tahun 2008 hingga 2012, program PLPBK di Jawa Tengah dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota dan terdapat 185 BKM yang mewakili desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan program ini. Hal ini berarti sumber data atau objek yang akan diteliti sangat luas. Dengan demikian, menurut Sugiyono (2012), perlu digunakan teknik cluster atau area sampling. Dalam penentuan daerah mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel dilakukan berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini, yaitu *purposive sampling* atau sampel terpilih. (Sugiyono, 2012). *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, antara lain:

1. Sampel wilayah yang diambil dapat merepresentatifkan BKM yang sukses menjalankan PLPBK
2. Luasnya wilayah studi
3. Waktu studi yang terbatas
4. Sumberdaya yang terbatas untuk studi
5. Dana yang terbatas
6. Kemudahan dalam pengambilan data

Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebab anggota BKM di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan yang dijadikan sampel adalah

anggota yang terlibat langsung dalam program PLPBK di kelurahan/desanya. Diketahui jumlah populasi dari tujuh BKM yang ada di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan, yakni tiap BKM sebesar 15 orang.

Untuk memudahkan pengambilan data serta mendapatkan data yang lebih merepresentasikan sampel dalam keseluruhan populasi secara merata, dilakukan dengan masing-masing BKM sebesar 10 sampel. Pembagian secara proporsional berdasarkan tujuh kelurahan di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan sebagai berikut:

**TABEL I.3**  
**PEMBAGIAN SAMPEL**

No	Nama BKM	Desa/ Kelurahan	Jumlah Anggota (orang)
<b>Kabupaten Kendal</b>			
1.	BKM Sejahtera Mandiri	Kebondalem	10
2.	BKM Sumber Makmur	Sidorejo	10
3.	BKM Mulia	Kutoharjo	10
4.	BKM Mekar Sari	Plantaran	10
<b>Kota Pekalongan</b>			
5.	BKM Podosugih	Podosugih	10
6.	BKM Barokah	Kramatsari	10
7.	BKM Aji Rasa	Kraton Kidul	10
<b>Total</b>			<b>70</b>

*Sumber: Analisis Penyusun, 2014*

#### **1.14 Kebutuhan Data**

Kebutuhan data diperlukan untuk mempermudah pengumpulan data dengan menjabarkan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, kebutuhan data juga dapat mempermudah checklist data apa saja yang telah ataupun belum diambil. Kebutuhan data ini dalam penyusunannya disesuaikan dengan sasaran dan manfaat analisis penelitian. Oleh karena itu, dilakukan pengelompokan antara sasaran, manfaat analisis, data yang dibutuhkan, jenis data, bentuk data, dan sumber data. Berikut ini merupakan kebutuhan data pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas pelaksanaan program penataan lingkungan perumahan di perkotaan:

**TABEL I.4**  
**KEBUTUHAN DATA**

No	Sasaran	Manfaat Analisis	Kebutuhan Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber
1.	Analisis tingkat realisasi program PLPBK	Untuk mengetahui realisasi dari pelaksanaan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk perencanaan (RPP dan RTPLP)</li> <li>• Data hasil kuesioner dari realisasi pelaksanaan program PLPBK yang diukur dari realisasi pemanfaatan dana BLM, program pemanfaatan dana BLM, dan besaran kemitraan program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data primer</li> <li>• Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi</li> <li>• Tabel angka</li> <li>• Gambar</li> </ul>	BKM, Askot (Asisten Kota), dan hasil kuesioner
2.	Analisis kapasitas kelembagaan lokal	Untuk mengetahui kapasitas kelembagaan lokal pada BKM-BKM di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data hasil kuesioner dari kapasitas kelembagaan lokal yang diukur dari level individu, level kelompok, dan level organisasi.</li> </ul>	Data primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi</li> <li>• Tabel angka</li> <li>• Gambar</li> </ul>	Hasil kuesioner
3.	Analisis keberlanjutan program yang dilihat dari prinsip keberlanjutan (SEL)	Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang relevan untuk keberlanjutan program PLPBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data hasil kuesioner yang dilihat dari prinsip keberlanjutan (Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan)</li> <li>• Produk perencanaan (RPP dan RTPLP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data primer</li> <li>• Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi</li> <li>• Tabel angka</li> <li>• Gambar</li> </ul>	BKM, Askot (Asisten Kota), dan hasil kuesioner

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

### 1.15 Kerangka dan Teknik Analisis

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan analisis yang bersifat deduktif. Pengolahan data pada penelitian ini bersifat numerik yang dijelaskan secara deskriptif. Metode pada penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan data-data yang bersifat peta, angka, maupun grafik.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berupa analisis statistik deskriptif dan analisis skoring dengan *Likert Scale*. Untuk analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik BKM, analisis skoring dengan *Likert Scale* untuk menganalisis kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program.

**TABEL I.5**  
**TEKNIK ANALISIS**

No.	Teknik Analisis (tools)	Aspek Analisis	Variabel
1.	Analisis Statistik Deskriptif	Karakteristik individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia</li> <li>• Status menikah</li> <li>• Lama tinggal</li> <li>• Asal penduduk</li> <li>• Jenis pekerjaan</li> <li>• Tingkat pendidikan</li> </ul>
		Efektivitas program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi pemanfaatan dana BLM</li> <li>• Program pemanfaatan dana BLM</li> <li>• Besaran kemitraan program</li> </ul>
2.	Analisis Skoring dengan <i>Likert Scale</i>	Kapasitas kelembagaan lokal	<p>Level individu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat saling mengenal</li> <li>• Tingkat komitmen individu</li> </ul> <p>Level kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kedekatan antaranggota</li> <li>• Tingkat kepedulian</li> <li>• Tingkat ketergantungan antaranggota</li> <li>• Hubungan emosional</li> </ul> <p>Aspek organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepemimpinan</li> <li>• Tingkat kegotongroyongan</li> <li>• Pemahaman tujuan</li> <li>• Pembagian kerja</li> </ul>
		Efektivitas program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemanfaatan dana BLM</li> </ul>

*Sumber: Analisis Penyusun, 2014*

### 1.15.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Teknik ini bertujuan hanya untuk menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada (Bungin, 2010). Dalam penelitian ini, beberapa teknik analisis statistik deskriptif yang digunakan berupa diagram-diagram distribusi frekuensi (diagram lingkaran dan batang).



### 1.15.2 Analisis Skoring dengan *Likert Scale*

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis skoring. Analisis ini digunakan untuk menilai kriteria atau penilaian tertentu dengan menggunakan skala terukur. Analisis skoring pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar kapasitas BKM serta efektivitas pelaksanaan program yang ada di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan dalam program PLPBK.

Penggunaan analisis skoring dengan *Likert Scale* ini digunakan untuk menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program. Pengembangan kapasitas kelembagaan lokal yang diukur dari level individu dan level lembaga, sedangkan efektivitas program diukur dari kuantitas, kualitas, dan waktu. Skala likert (*Likert Scale*) itu sendiri digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012). Fenomena sosial ini ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dalam skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan parameter untuk menyusun pertanyaan.

Untuk perhitungan skor dari masing-masing responden, penggunaan skala ini diperoleh dengan lima alternatif jawaban yang berjenjang (ordinal), seperti sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Berikut ini adalah kelas hasil skoring:

**TABEL I.6**  
**KELAS HASIL SKORING**

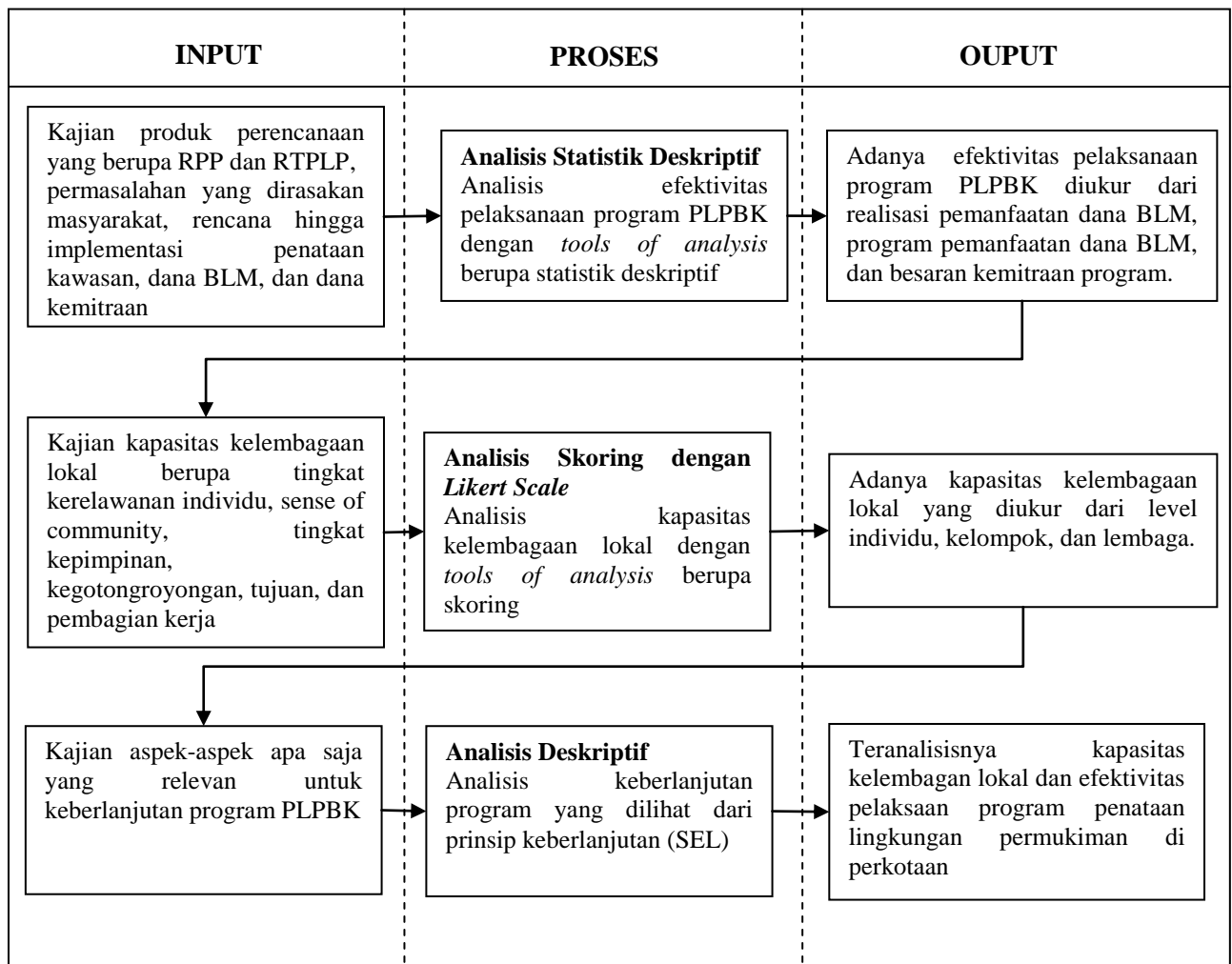
<b>Kelas</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
I	Kapasitas BKM <b>sangat baik</b> dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	5
II	Kapasitas BKM <b>baik</b> dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	4
III	Kapasitas BKM <b>biasa saja</b> dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	3
IV	Kapasitas BKM <b>tidak baik</b> dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	2
V	Kapasitas BKM <b>sangat tidak baik</b> dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	1

*Sumber: Analisis Penyusun, 2014*

Dari teknik analisis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dibuatlah kerangka analisis yang berfungsi untuk menjabarkan tahapan yang akan dilakukan

pada penelitian. Pada kerangka analisis terdapat tahapan input, proses, dan output. Output yang dihasilkan berfungsi untuk menjawab tujuan dari penelitian melalui sasaran yang ada.

**TABEL I.7**  
**KERANGKA ANALISIS**



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

### 1.16 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi penjelasan singkat mengenai isi laporan Tesis secara menyeluruh. Laporan ini terdiri dari lima bab yang disajikan secara sistematis dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab I pada laporan tesis ini berisi gambaran dan pemahaman awal mengenai topik yang menjadi fokus penelitian beserta justifikasi

pemilihan topik tersebut. Pada bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, manfaat penelitian, posisi penelitian dalam perencanaan wilayah dan kota, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PLPBK**

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan lokal dan efektivitas program PLPBK. Pada bagian akhir terdapat simpulan literatur dan variabel terpilih yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB III GAMBARAN UMUM PROGRAM PLPBK DI KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran wilayah studi penelitian yakni di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan. Pada bab ini dijabarkan mengenai potensi, masalah, rencana pengembangan kawasan prioritas, keberlanjutan program, serta gambaran mengenai BKM-BKM yang menjadi sample penelitian.

## **BAB IV KAPASITAS KELEMBAGAAN LOKAL DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PLPBK DI KABUPATEN KENDAL DAN KOTA PEKALONGAN**

Bagian ini menjelaskan detail mengenai analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis kapasitas kelembagaan lokal dan analisis efektivitas pelaksanaan program PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada kapasitas kelembagaan lokal dalam keefektifan kegiatan PLPBK di Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan.